

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2015-2016 |
| Masa Persidangan | : V |
| Rapat Ke | : 14 |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat |
| Dengan | : 1. Menteri Dalam Negeri 2. Kepala BNPP 3. Ketua KPU RI 4. Ketua Bawaslu RI 5. Ketua ORI |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari, Tanggal | : Kamis, 9 Juni 2016 |
| Waktu | : Pukul 13.00 WIB s.d Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III) |
| Acara | : 1. Pembahasan RKA K/L APBN-P Tahun 2016 2. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2015 dan Tahun 2016 (tahun berjalan) |
| Ketua Rapat | : Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Drs. Nasrulloh, M.A.P/Kabagset Komisi II DPR RI |
| Hadir | : 29 Anggota Komisi II DPR RI |

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Kamis, 9 Juni 2016 dibuka pada pukul 14.30 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan Pembahasan RKA K/L APBN-P Tahun 2016 dan Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2015 dan Tahun 2016 (tahun berjalan)
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPP, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua ORI untuk memberikan pemaparannya dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan masukan.

II. KESIMPULAN

- A. Komisi II DPR RI dapat memahami penjelasan terkait pagu anggaran APBN Perubahan tahun 2016 beserta penyesuaian anggaran sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan

Ombudsman Republik Indonesia (ORI), serta akan membahasnya lebih lanjut pada Raker/RDP yang akan datang.

- B. Terhadap usulan tambahan anggaran ORI sebesar Rp152.667.419.000,-, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara lebih mendalam pada Raker/RDP yang akan datang.
- C. Terhadap realisasi pelaksanaan APBN tahun 2015) dan realisasi tahun berjalan pada tahun anggaran 2016 :
 - 1. Kementerian Dalam Negeri (63,37% pada tahun 2015) dan (17,95% s.d 8 Juni 2016)
 - 2. BNPP (82,84% pada tahun 2015) dan (11,79% s.d Mei 2016)
 - 3. KPU (80,16% pada tahun 2015) dan (29,88% s.d 3 Juni 2016)
 - 4. Bawaslu (79,04% pada tahun 2015) dan (23,06% s.d 8 Juni 2016)
 - 5. ORI (66,05% pada tahun 2015) dan (27,09% s.d Mei 2016)

Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk segera menyampaikan laporan rincian hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun 2015 dan 2016, serta diserahkan kepada Komisi II DPR RI sebelum dimulainya pembicaraan pendahuluan APBN Tahun Anggaran 2017.

- D. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, BNPP, dan Bawaslu yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tahun 2015, serta meminta kepada KPU dan ORI yang masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan dan administrasi agar mampu memperoleh opini WTP di masa yang akan datang

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.45 WIB.

Jakarta, 9 Juni 2016
Wakil Ketua Komisi II DPR RI

ttd
Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA
A-345